



Evaluasi Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Sukawati, Kabupaten Gianyar

A. A Istri Saraswati^{1*}, I Putu Dharmanu Yudharta², I Dewa Ayu Putri Wirantari³
¹⁻³ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, Indonesia

Alamat: 86G9+RJV, Jalan P.B. Sudirman, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80234

Korespondensi penulis: geksaraswati.s@gmail.com

Abstract. *Revitalization of traditional markets is a manifestation of the commitment of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia in efforts to improve the economy through development, empowerment, and then improving the quality of management in traditional markets as an effort to increase the competitiveness of traditional markets. The purpose of this study is to determine and examine the impact of the traditional market revitalization policy on Sukawati Market, because Sukawati Market is one of the markets with a high level of tourism productivity in Gianyar Regency. This study uses Qualitative methods, as well as the Policy Evaluation theory according to William N. Dunn (2003). This study found that the Evaluation of the Impact of the Sukawati Market Revitalization Policy has not achieved optimal results in all policy evaluation indicators, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The suboptimal revitalization policy at Sukawati Market as an effort to increase competitiveness in order to improve the welfare of traders is influenced by several things, namely human resource capacity, changes in infrastructure, and changes in market function after revitalization. The recommendations in this study are increasing human resource capacity, dissemination of information and promotion, and improving market governance.*

Keywords: *Policy, Evaluation, Market, Revitalization, Trader.*

Abstrak. Revitalisasi pasar rakyat merupakan wujud komitmen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam upaya peningkatan perekonomian melalui pembangunan, pemberdayaan, kemudian peningkatan kualitas pengelolaan pada pasar rakyat sebagaimana upaya dalam peningkatan daya saing pasar rakyat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meneliti bagaimana dampak dari kebijakan revitalisasi pasar rakyat bagi Pasar Sukawati, karena Pasar Sukawati merupakan salah satu pasar dengan tingkat produktivitas pariwisata yang tinggi di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, serta teori Evaluasi Kebijakan menurut William N. Dunn (2003). Penelitian ini menemukan bahwa Evaluasi Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Sukawati belum mencapai hasil yang optimal pada seluruh indikator evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Tidak optimalnya kebijakan revitalisasi pada Pasar Sukawati sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan pedagang dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kapasitas sumber daya manusia, perubahan infrastruktur, dan perubahan fungsi pasar pasca revitalisasi. Adapun rekomendasi pada penelitian ini yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyebaran informasi serta promosi, dan peningkatan dalam tata kelola pasar.

Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Revitalisasi, Pasar, Pedagang.

1. LATAR BELAKANG

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan bernegara. Dalam mewujudkannya diperlukan mekanisme tertentu yang tercermin dalam kebijakan publik yang dibuat. Kebijakan publik sebagai keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat (Robert Eyestone, 1971). Pembangunan perekonomian dapat dimulai dalam perspektif lokal salah satunya adalah melalui pasar rakyat. Pasar sebagai tempat pertukaran barang dan pusat pengembangan ekonomi rakyat. Selain itu pasar juga

berperan sebagai pusat perputaran uang daerah dan sebagai wadah untuk melakukan peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat hingga penurunan angka kemiskinan lapangan pekerjaan. Peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui pasar rakyat, secara khusus dibangun dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal pada daerah tersebut.

Pasar rakyat juga menjadi salah satu warisan budaya dan sosial dengan adanya kuliner, kerajinan, maupun seni lokal yang diperdagangkan. Pasar rakyat mendukung pengusaha mikro, atau pedagang kecil dalam pemasaran, dengan demikian keberlangsungan perekonomian lokal berkembang dan mengurangi ketergantungan industri besar. Harga terjangkau pula menjadi ciri khas dari pasar rakyat daripada toko modern. Pasar rakyat dapat menjadi peluang wisata dan pariwisata dengan daya tarik terhadap wisatawan dengan keunikan dan autentiknnya. Masyarakat akan melatih kreativitas dan inovasi dalam pengembangan produk dengan adanya permintaan pasar.

Sejak tahun 2015 revitalisasi pasar rakyat semakin masif menjadi bagian pada kabinet kerja pemerintah. Dengan demikian, terbentuk kebijakan publik yang diimplementasikan melalui kebijakan revitalisasi pasar rakyat melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pembangunan, Rehabilitasi, Atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Revitalisasi pasar merupakan upaya untuk mendukung perkembangan pada pasar rakyat. Perbaikan fisik pasar, penataan pasar, serta pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pengelola dan pedagang adalah konsentrasi dari kebijakan ini (Kementerian Perdagangan RI, 2015). Berdasarkan program prioritas tersebut pasar sukawati menjadi salah satu pasar yang dijadikan sasaran pemerintah pusat dalam melakukan revitalisasi pasar rakyat, yang terletak pada Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

Pasar Rakyat Sukawati telah berdiri sejak tahun 1985 dan memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai pasar umum dan pasar seni. Di kawasan pasar umum, berbagai produk kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti pangan, perhiasan emas, dan sarana prasarana upakara tersedia untuk masyarakat. Sementara itu, Pasar Seni Sukawati dikenal sebagai "*Landmark*" Desa Sukawati dan Kabupaten Gianyar (Widiyani & Yulianasari, 2019). Pasar Seni Sukawati merupakan pasar seni pertama di Provinsi Bali. Pasar tersebut menjual berbagai hasil kerajinan seni dari masyarakat lokal, yang sebagian besar bekerja sebagai pengrajin. Pasar Rakyat Sukawati memiliki popularitas dan produktivitas yang tinggi, dengan banyaknya kunjungan dari masyarakat lokal, wisatawan domestik, hingga mancanegara. Pasar ini berperan penting dalam mendukung siklus perekonomian yang baik bagi masyarakat sekaligus turut

berkontribusi pada pembangunan kemandirian ekonomi lokal. Namun, dari segi infrastruktur, pasar yang sudah lama ini mengalami penurunan kualitas. Bangunan tampak usang, kotor, dan semrawut akibat kurangnya fasilitas yang memadai serta tata kelola yang kurang teratur. Masalah seperti area parkir yang terbatas sehingga menyebabkan kemacetan, toilet yang tidak terawat, tempat sampah yang berbau, serta ruang belanja yang sempit dan tidak teratur membuat pengunjung merasa kurang nyaman. Dengan demikian, pasar rakyat sukawati pada tahun 2019 hingga 2022 direvitalisasi dengan cara pembangunan pasar baru dengan biaya Rp. 160 Miliar (Sekretariat Kabinet RI, 2023).

Pembangunan revitalisasi pasar dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sedangkan pengelolaan pasar tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar. Kebijakan revitalisasi pasar memiliki tujuan untuk mewujudkan pasar rakyat tampil modern, kemudian dapat bersaing dengan swalayan atau toko modern dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pedagang pasar rakyat. Selain itu, revitalisasi bertujuan dalam peningkatan pelayanan untuk dapat menjangkau konsumen lebih optimal, yang didukung prasarana fisik sehingga pasar rakyat menjadi modern, bersih, sehat, aman, segar, dan nyaman. Kebijakan revitalisasi pasar rakyat sukawati, telah selesai secara bertahap mulai dari tahun 2021 dan sudah siap untuk difungsikan, namun pada kenyataannya menghadapi beberapa permasalahan setelah adanya kebijakan revitalisasi tersebut.

Setelah dilakukan revitalisasi, Pasar Sukawati mengalami perubahan besar dalam hal bangunan dan fungsinya. Bangunan pasar kini lebih megah dan dilengkapi dengan fasilitas modern, seperti area parkir yang lebih luas, sistem tata udara yang lebih baik, serta penataan ruang yang lebih nyaman bagi para pengunjung. Ketiga bloknnya pun kini sepenuhnya beralih fungsi menjadi pasar seni, di mana seluruh blok difokuskan untuk menjual barang-barang seni dan kerajinan tangan. Kemudian Pasar umum rakyat sukawati yang berfungsi menjual kebutuhan sehari-hari yang sebelumnya terletak pada Blok C yang berjarak sekitar 10 meter dengan Blok A dan Blok B, kini direlokasi dan terletak sejauh sekitar 3,4 kilometer dari jarak pasar sebelumnya. Sebanyak 776 jumlah pedagang pasar umum sukawati, yang secara langsung menghadapi perubahan atas adanya kebijakan revitalisasi ini. Adapun klasifikasi 776 pedagang berdasarkan jenis dagangan dan jumlah sebagai berikut:

Tabel 1. Rekap Pengelompokan Pedagang Pasar Umum Relokasi Sukawati Tahun 2021

NO	JENIS DAGANGAN	JUMLAH
1.	BUAH	115
2.	KAIN	77
3.	HASIL BUMI	97
4.	TOKO	28
5.	TELOR	3
6.	DAGING	65
7.	IKAN	30
8.	SAYUR	91
9.	JAJAN BALI	27
10.	ALAT UPACARA	55
11.	BUNGA	58
12.	KIOS	45
13.	PLASTIK	7
14.	SEPATU SANDAL	21
15.	MAKAN MINUM	23
16.	SNCAK	18
17.	KACANG	16
TOTAL		776

(Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar, 2024)

Pasar relokasi dan pasar seni sukawati blok C memiliki potensi yang besar dalam kapasitas daya tampung, namun tidak berjalan optimal. Adapun data potensi, pedagang aktif dan tidak aktif sebagai berikut:

Tabel 2. Data Pedagang Pasar Umum Relokasi Sukawati Tahun 2024

No	Lokasi	Potensi	Aktif	Tidak Aktif
1	Los	500 Unit	0 Unit	500 Unit
2	Kios	70 Unit	10 Unit	60 Unit
Total:		570 Unit	20 Unit	550 Unit

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024)

Berdasarkan Tabel 2. menjelaskan bahwa banyak unit potensi yang dimiliki pasar relokasi, namun sebagian besar tidak aktif, karena masih terdapat banyak kios dan los yang kosong. Demikian pula, di Pasar Seni Gedung Blok C, terdapat potensi serupa dengan data jumlah pedagang aktif dan tidak aktif, yang datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Data Pedagang Pasar Seni Sukawati Blok C Tahun 2024

No	Lokasi	Potensi	Aktif	Tidak Aktif
1	Lantai Dasar (Ground)	194 Unit	27 Unit	167 Unit
2	Lantai I	120 Unit	95 Unit	25 Unit
3	Lantai II			
	Los	87 Unit	51 Unit	36 Unit
	Kios	39 Unit	12 Unit	27 Unit
4	Lantai III			
	Los	128 Unit	18 Unit	110 Unit
	Kios	27 Unit	0 Unit	27 Unit
Total:		595 Unit	203 Unit	392 Unit

(Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar, 2024)

Berdasarkan pada data pada tabel 3. menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki tidak dimanfaatkan secara optimal. Unit yang tidak aktif melebihi unit yang aktif. Sama seperti pasar relokasi, masih banyak terdapat kios dan los yang tidak aktif atau kosong. Kebijakan revitalisasi perlu dinilai berdasarkan kegunaan dan dampaknya bagi kelompok sasaran, serta sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan misi yang diharapkan melalui evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang didalamnya menyangkut penilaian terhadap kebijakan dengan mencakup substansi, implementasi, dan dampak pelaksanaan suatu kebijakan (Winarno, 2008:166). Meskipun bangunan pasar kini terlihat lebih modern, kesejahteraan pedagang belum meningkat secara signifikan. Pasar tradisional seharusnya mampu bersaing dengan tetap mempertahankan kekhasan dan keunggulan lokalnya, namun kebijakan ini belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Tidak optimalnya fungsi pasar yang kini lebih fokus pada penampilan fisik yang megah, tetapi kurang efektif dalam mendukung aktivitas perdagangan tradisional, menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya tepat untuk mencapai tujuan peningkatan daya saing dan kesejahteraan pedagang.

Masalah seperti di atas, merupakan salah satu perhatian dalam kerangka ilmu administrasi publik khususnya pada kebijakan publik dan secara spesifik adalah evaluasi kebijakan publik yang dilihat melalui keenam kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk memperhatikan suatu kebijakan publik yang telah berjalan dan mengetahui apakah berhasil meraih tujuan yang diinginkan sebelumnya (Winarno, 2012). Berdasarkan persoalan diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Evaluasi Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Sukawati, Kabupaten Gianyar”.

2. KAJIAN TEORITIS

Evaluasi kebijakan secara umum menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. sehingga evaluasi sebagai alat pengontrol sebuah kebijakan yang sudah dibentuk agar dapat terlaksana secara optimal. Dalam bukunya *Public Policy Analysis* (2003:608), William N. Dunn mendefinisikan evaluasi kebijakan publik sebagai upaya untuk menganalisis hasil kebijakan melalui penaksiran, analisis angka, dan penilaian hasil kebijakan. Pentingnya evaluasi untuk dapat mengukur sebuah kebijakan yang tengah berlaku di kehidupan masyarakat. Berdasarkan sudut pandang berbagai pakar tersebut, maka evaluasi kebijakan berarti penilaian yang mengukur proses dan hasil dari suatu kebijakan, serta sebagai alat kontrol suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, khususnya bagi sasaran kebijakan.

Pada prinsipnya tipe evaluasi kebijakan sangat bervariasi tergantung dari tujuan dan level yang dicapai. Menurut William N Dunn, berdasarkan pada waktu pelaksanaannya evaluasi kebijakan dibagi menjadi 3, (Pramono, J. 2020), evaluasi pra-kebijakan, evaluasi tengah berlangsung, dan evaluasi setelah berlangsung. Dalam penelitian ini, tipe evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi setelah berlangsung. Hal ini dikarenakan kebijakan revitalisasi Pasar Sukawati Kabupaten Gianyar dilaksanakan pada tahun 2019, sedangkan penelitiannya dilakukan pada tahun 2024. Adapun 6 (enam) indikator kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003: 429–438) faktor yang digunakan untuk menganalisis kebijakan revitalisasi pasar sukawati, Kabupaten Gianyar sebagai berikut:

1. Efektivitas berkenaan mengenai suatu pilihan kebijakan memenuhi tujuan tindakan atau mencapai hasil yang diharapkan. Efektivitas berhubungan dengan rasionalitas teknis, diukur dari unit produk maupun pelayanan nilai. Dengan demikian setelah kebijakan publik terlaksana, dan tidak mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kebijakan tersebut gagal, namun adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu;
2. Efisiensi berkenaan dengan seberapa usaha yang diperlukan dalam kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi berhubungan dengan upaya. Dalam evaluasi kebijakan biasanya berupa biaya, manfaat bersih, kemudian efisiensi

identik dengan rasionalitas ekonomi. Efisiensi adalah ketika mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil;

3. Kecukupan ditinjau melalui sejauh mana pencapaian tujuan kebijakan sesuai dan dapat dirasakan telah mencukupi berbagai hal. Dalam kecukupan dilihat melalui tingkat korelasi antara hasil yang diproyeksikan dan alternatif kebijakan ditekankan pada kriteria kecukupan, atau tingkat efektivitas dapat memuaskan kebutuhan. Efektivitas dan kecukupan berhubungan untuk menilai bagaimana suatu kebijakan atau alternatif memuaskan kebutuhan.
4. Perataan pada kebijakan merupakan keadilan yang diberikan serta diperoleh sasaran kebijakan. Perataan dalam evaluasi kebijakan mengacu pada upaya yang didistribusikan apakah merata kepada berbagai kelompok sosial dan berkaitan secara erat dengan rasionalitas hukum dan sosial;
5. Responsivitas adalah sejauh mana suatu kebijakan dapat memenuhi persyaratan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok sosial tertentu. Kriteria responsivitas merupakan respon dari suatu tindakan seperti suatu tanggapan dari sasaran kebijakan atas suatu penerapan kebijakan. Kriteria ini memprediksi pengaruh suatu kebijakan melalui tanggapan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, maupun dampak setelah suatu kebijakan dilaksanakan oleh masyarakat.
6. Ketepatan memiliki pernyataan pada penilaian kebijakan atas asumsi yang melandasi tujuan suatu kebijakan. Ketepatan merujuk pada hasil dari suatu kebijakan yang dinilai secara faktual berdasarkan kegunaan dan nilai yang sesuai dengan tujuan awal kebijakan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif akan memberikan jawaban secara mendalam dan makna secara lebih luas untuk menjawab rumusan masalah (Yudarta, 2022). Penelitian menggunakan sumber primer melalui wawancara terhadap informan yang bekerja di pasar sukawati Kabupaten Gianyar dan menggunakan data sekunder. Penelitian ini berlokasi di Pasar Sukawati, Kabupaten Gianyar. Teknik pengumpulan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Revitalisasi Pasar Sukawati di Kabupaten Gianyar merupakan salah satu kebijakan yang terlaksana melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pihak yang mengerjakan pembangunan pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar sebagai pihak pengelola pasar, dan pedagang pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Kebijakan Revitalisasi dilakukan karena bangunan pada pasar sukawati yang sudah tidak aman dan nyaman. Adapun hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Sukawati Kabupaten Gianyar yang berdasarkan Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut William Dunn (2003) terdiri dari Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan adalah sebagai berikut:

Efektivitas

Efektivitas dalam kebijakan publik berkaitan dengan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam evaluasi kebijakan revitalisasi Pasar Sukawati, efektivitas akan dinilai berdasarkan dari adanya sosialisasi kebijakan, pencapaian tujuan kebijakan, dan adanya pemantauan kebijakan.

Dalam proses sosialisasi kebijakan revitalisasi Pasar Sukawati dilaksanakan pada 6 Oktober 2019 di Lapangan Sutasoma, Jl. Batuan, Desa Sukawati. Kegiatan ini dihadiri oleh para pedagang, perwakilan Disperindag, serta pihak terkait lainnya untuk membahas dan menyepakati kebijakan revitalisasi. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pedagang mengenai teknis berjualan selama pembangunan pasar. Pedagang di Pasar Seni Blok A dan B direlokasi ke Lapangan Sutasoma, sedangkan pedagang pasar umum dipindahkan ke daerah Gelumpang, Desa Sukawati. Selain itu, sosialisasi juga menjelaskan perubahan fungsi pasar, di mana setelah revitalisasi, pasar umum akan dialihkan menjadi Pasar Seni Blok C, sementara pasar umum akan tetap beroperasi di lokasi relokasi di Gelumpang. Berdasarkan hasil temuan terkait dengan proses sosialisasi kebijakan revitalisasi pasar sukawati, jika dikaitkan dengan kriteria efektivitas, maka dapat dilihat bahwa sosialisasi berjalan dengan optimal.

Selanjutnya mengukur kriteria efektivitas suatu kebijakan melalui tujuan kebijakan. Hal ini menentukan apakah sesuai antara hasil yang diharapkan dengan tujuan kebijakan. Kebijakan revitalisasi Pasar Sukawati bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik pasar tradisional agar lebih menarik bagi masyarakat dan wisatawan, serta memperbaiki

fasilitas fisik seperti area jual beli, sanitasi, tempat parkir, dan toilet guna meningkatkan kenyamanan pengunjung. Hasil temuan dilapangan menunjukan kebijakan ini menghadapi beberapa tantangan dalam implementasinya. Hasil bangunan revitalisasi yang bertingkat belum sepenuhnya optimal, karena terjadi ketimpangan tingkat kunjungan antar lantai. Pedagang di lantai atas mengalami penurunan jumlah pengunjung dibandingkan lantai 1, yang berpotensi memengaruhi tingkat penjualan. Selain itu, perubahan fungsi Pasar Seni Sukawati Blok C yang bertujuan memperkuat peran daerah Sukawati sebagai pusat pasar seni justru berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pedagang. Faktor seperti kurangnya minat pedagang untuk menempati kios, perubahan pola kunjungan wisatawan, serta keterbatasan strategi promosi menjadi kendala utama dalam pemanfaatan hasil kebijakan ini. Kebijakan perubahan fungsi pasar pasca-revitalisasi juga berdampak pada pedagang pasar umum dan masyarakat. Pasar relokasi yang kurang strategis menyebabkan masyarakat enggan berbelanja dan menurunnya minat berjualan di lokasi tersebut, sebab kurangnya aktivitas transaksi. Para pedagang memilih berjualan di sekitar Pasar Seni, baik di kios milik warga maupun di trotoar, yang berdampak pada kenyamanan lingkungan, seperti peningkatan jumlah sampah dan kemacetan. Berdasarkan hasil temuan terkait dengan hasil pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar sukawati, jika dikaitkan dengan kriteria eektivitas, maka dapat dilihat bahwa tujuan program belum berjalan dengan optimal.

Selain daripada sosialisasi dan tujuan kebijakan, adapun dalam mengukur kriteria efektivitas melalui indikator pemantauan kebijakan. Pemantauan hasil kebijakan revitalisasi Pasar Sukawati bertujuan untuk mengidentifikasi, dan meningkatkan hasil kebijakan agar tujuan revitalisasi dapat tercapai secara optimal. Dalam pelaksanaannya, pemantauan dilapangan dilakukan secara rutin oleh kepala pasar dan stafnya, mencakup aspek sarana dan prasarana, kelayakan bangunan, sistem pemungutan retribusi, kebersihan, keamanan, serta kelancaran aktivitas jual beli. Kemudian nantinya akan dilaporkan melalui UPTD Pasar dan Bidang Pasar Disperindag yang berperan dalam pertanggungjawaban atas pengawasan operasional pasar.

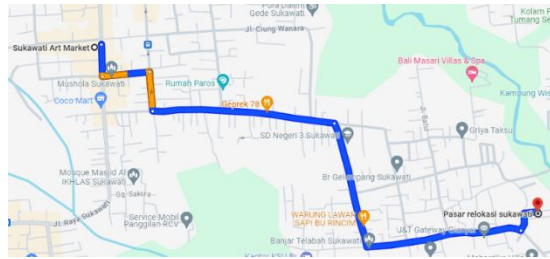
Efisiensi

Dalam mengukur efisiensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan hasil kebijakan revitalisasi pasar sukawati berdasarkan hasil temuan bahwa kuantitas sumber daya manusia pada pihak pengelola pasar seni sukawati sudah memadai. Pada pasar blok C dikelola oleh seorang koordinator pasar, 3 orang petugas keamanan dan 18 petugas umum

dengan total jumlah staff adalah 22 orang. Kemudian pada pasar blok A dan B dikelola oleh seorang koordinator pasar, 8 orang petugas keamanan dan ketertiban, 6 orang petugas umum, dan 4 orang petugas pemeliharaan dan kebersihan. Namun dengan kuantitas tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan dari pedagang. Kapasitas pengelola pasar dan staf pasar yang bekerja sama langsung dengan pedagang diharapkan dapat memberikan solusi secara inovatif atas permasalahan yang dihadapi. Melalui sisi sumber daya pedagang, tingkat kapasitas dalam pemasaran online masih kurang masif untuk bersaing di era saat ini. Dengan optimalisasi sumber daya manusia, diharapkan revitalisasi pasar tidak hanya menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan bagi para pedagang dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam mengukur kriteria efisiensi dilihat pula melalui anggaran biaya, waktu dan sarana prasarana untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan, pengeluaran dan hasilnya dalam kebijakan revitalisasi Pasar Sukawati. Berdasarkan hasil temuan anggaran dan biaya dalam pelaksanaan pembangunan pasar pada kebijakan revitalisasi Pasar Sukawati dikelola secara teknis oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain itu, proses pengelolaan anggaran diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada anggaran operasional dalam hal pemeliharaan secara fisik yang dikelola oleh Bidang Pasar Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gianyar, ditemukan bahwasannya meskipun biaya operasional lebih besar dibandingkan pemasukan retribusi, jika manfaat yang diberikan kepada masyarakat lebih besar seperti peningkatan kesejahteraan pedagang, dan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal, maka biaya operasional pasar tetap dianggap efisien dari sudut pandang pelayanan publik, namun menurut hasil temuan pada efektivitas bahwa revitalisasi pasar belum secara optimal memberikan dampak positif kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan revitalisasi berdampak pada perubahan tarif retribusi pasar seni sukawati. Meskipun demikian, perubahan tarif pemungutan retribusi telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sejak terlaksananya kebijakan revitalisasi, Pasar Seni Sukawati blok A, B, dan C dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang sudah memadai untuk mendukung kenyamanan dan keamanan pengunjung serta pedagang. Seperti bangunan yang kokoh, parkir basement yang luas, lift yang aman, dan toilet yang jumlahnya memadai, serta kebersihan pasar dan keamanan dengan dilengkapi berbagai sarana tanggap bencana seperti alat pemadam kebakaran.



Gambar 1. Peta Pasar Umum Terdahulu ke Pasar Umum Relokasi

(Sumber: *Google Maps*, 2024)

Selanjutnya dari segi efisiensi waktu, dampak relokasi pasar umum yakni Pasar lama memiliki lokasi strategis di tengah Desa Sukawati, sedangkan pasar relokasi berada di bagian timur desa dengan jarak 2–3 km bagi sebagian besar banjar, kecuali Banjar Gelumpang dan Telabah. Relokasi ini menurunkan efisiensi waktu karena masyarakat membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai pasar, terutama bagi yang tinggal lebih jauh. Akibatnya, minat masyarakat untuk berbelanja di pasar relokasi menurun.

Kecukupan

Kecukupan dalam evaluasi kebijakan revitalisasi pasar sukawati ditinjau melalui analisis seberapa baik kebijakan yang dilakukan dalam kemampuan memenuhi kebutuhan dalam berbagai hal. Jika ditinjau pada kebijakan revitalisasi pasar sukawati, kriteria ini dapat dilihat melalui dua hal yaitu tingkat kunjungan, dan tingkat partisipasi pedagang.

Tingkat kunjungan mencerminkan daya tarik pasar bagi konsumen setelah revitalisasi, yang dapat dipengaruhi oleh faktor kenyamanan, fasilitas, serta aksesibilitas pasar. Adapun hasil temuan tingkat kunjungan ke Pasar Seni Sukawati sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan revitalisasi tidak mengalami penurunan, namun juga tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kemudian tingkat kunjungan ke Pasar Umum relokasi sangat minim sehingga para pedagang berpindah ke kios milik warga dan trotoar jalanan, yang berlokasi di sebelah-sebelah pasar seni sukawati atau sekitar lokasi pasar sebelum direlokasi. Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan meskipun pasar telah mengalami perbaikan infrastruktur, tingkat kunjungan ke pasar seni sukawati relatif stabil tanpa adanya peningkatan yang signifikan. Kemudian hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya relokasi pasar umum menyebabkan dinamika sosial yang berdampak pada rendahnya tingkat kunjungan pasar relokasi.

Selanjutnya menilai kriteria kecukupan melalui tingkat partisipasi pedagang yang menunjukkan sejauh mana kebijakan mampu mempertahankan dan menarik kembali

pedagang lama untuk berjualan, serta kemudahan bagi pedagang baru dalam beradaptasi. Adapun hasil temuan dilapangan mengenai tingkat partisipasi pedagang di Pasar Seni Sukawati Blok A dan B sudah optimal, dengan seluruh kios dan los terisi penuh. Namun, kondisi berbeda terjadi di Blok C, di mana dari total 595 unit, hanya 203 unit yang terisi, sementara 392 unit masih kosong. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil revitalisasi pasar belum berjalan secara optimal, terutama di Blok C. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, rendahnya partisipasi pedagang di pasar blok C disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya daya tarik lokasi dan pedagang pasar umum yang tidak beralih jualan menjadi pedagang barang kesenian. Kemudian tingkat partisipasi pedagang pada pasar umum relokasi masih rendah dikarenakan minimnya jumlah kunjungan sebab lokasi pasar relokasi yang kurang strategis.

Perataan

Perataan dalam kebijakan publik merupakan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan. Analisis perataan dalam kebijakan revitalisasi pasar ditinjau berdasarkan keadilan dalam distribusi manfaat dan penerapan aturan. Distribusi manfaat diantaranya adalah penyediaan sarana dan prasarana yang setara, akses yang adil terhadap fasilitas pasar, serta penerapan aturan yang tidak diskriminatif dalam pemungutan retribusi, tempat berdagang. Perataan juga dilihat tentang regulasi dimana menggunakan lahan yang tepat, regulasi dampak lingkungan, dan regulasi tentang standar kesehatan dan keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat yang terdampak pada kebijakan. Pemerataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terdampak kebijakan mendapatkan manfaat yang adil tanpa adanya kesenjangan oleh karena implementasi kebijakan revitalisasi.

Pemerataan dalam kebijakan revitalisasi pasar tercermin dari distribusi fasilitas yang setara di Pasar Seni Blok A, B, dan C, serta penerapan biaya retribusi sesuai regulasi berdasarkan lokasi dan luas kios atau los. Selain pedagang pasar seni, dampak kebijakan ini juga dirasakan oleh pedagang pasar umum dan masyarakat sekitar. Beberapa pedagang pasar umum yang secara aturan berjualan di pasar relokasi gelumpang, beralih berjualan di kios milik warga dan trotoar sebelah-sebelah pasar seni, hal ini menciptakan dinamika baru dalam tata ruang dan tata wilayah (RTRW). Perubahan ini berdampak dalam mempengaruhi keteraturan, aksesibilitas, dan fungsi ruang pada kawasan pasar.

Responsivitas

Responsivitas dalam proses evaluasi kebijakan revitalisasi pasar sukawati menjadi salah satu bagian yang penting dengan mencerminkan secara nyata preferensi nilai pedagang. Responsivitas yang baik tercermin dari tanggapan positif sasaran kebijakan terhadap penerapan kebijakan revitalisasi. Sebaliknya, responsivitas rendah terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diberikan dan kebutuhan sasaran kebijakan. Responsivitas juga mencerminkan sejauh mana organisasi mampu merespons harapan dan keinginan sasaran kebijakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar menurut hasil temuan terdapat permasalahan atau harapan dari pedagang setelah kebijakan revitalisasi diterapkan. Beberapa keluhan diantaranya adanya keluhan tentang menurunnya kenyamanan berjualan di lantai atas akibat rendahnya kunjungan pembeli, yang berdampak pada penurunan penjualan. Selain itu, kinerja pengelola pasar dianggap kurang optimal karena ketidakhadiran selama jam operasional, menghambat koordinasi dan respons terhadap pedagang. Selanjutnya adalah keluhan terkait prosedur birokrasi yang panjang dalam menangani keluhan dan masalah secara cepat dan efektif.

Adapun tindakan dari kepala pasar sebagai pihak pengelola telah terbuka dalam berkomunikasi dengan pedagang, baik secara langsung maupun online, untuk menjelaskan mekanisme pengelolaan pasar dan kendala yang dihadapi. Selain itu, setiap keluhan pedagang dicatat dan diteruskan ke pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur dan mendapatkan solusi yang tepat. Jika dikaitkan dengan kriteria responsivitas maka tindakan ini sudah optimal namun masih perlu ditingkatkan dalam hal penyelesaian masalah. Kemudian dalam responsivitas, ditinjau melalui sikap pihak yang berwenang dalam kebijakan terhadap sasaran kebijakan. Adapun hasil temuan kepala Disperindag untuk menyikapi keluhan tersebut, yakni Kepala Disperindag Gianyar mengambil sikap untuk bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pasar Seni Sukawati dengan memasukkannya ke dalam rute wisata. Selain itu, dilakukan pemantauan berkala terhadap keluhan pedagang untuk memastikan tindak lanjut yang konkret dan penyelesaian masalah yang cepat serta efektif. Jika dikaitkan dengan kriteria responsivitas maka tindakan ini sudah optimal namun masih perlu ditingkatkan dalam hal meningkatkan kunjungan pasar.

Ketepatan

Ketepatan dalam evaluasi kebijakan dapat ditinjau dengan mengukur tingkat kesesuaian hasil kebijakan untuk sasaran kebijakan dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang ada, serta analisis dampak dari kebijakan. Ketepatan akan menilai apakah revitalisasi pasar benar-benar solusi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Jika kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan pedagang, maka penerapannya akan lebih efektif menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemampuan dalam menyelesaikan masalah tersebut akan memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

Penilaian ketepatan berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa kebijakan revitalisasi Pasar Seni Sukawati dapat berhasil mengatasi permasalahan yang ada sebelum revitalisasi, yakni dengan menghasilkan peningkatan kualitas infrastruktur dan penyediaan fasilitas pasar. Namun, adapula dampak yang diberikan dengan adanya perubahan dalam infrastruktur bangunan yang bertingkat, menyebabkan perbedaan kunjungan antar lantai, sehingga mempengaruhi penjualan pedagang. Kebijakan juga berdampak dengan adanya perubahan fungsi pasar yang menimbulkan tantangan baru bagi pedagang, pengelola, dan pemerintah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah dari bagaimana Evaluasi Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Sukawati, Kabupaten Gianyar sebagai bentuk pelayanan kepada publik dan upaya dalam mensejahterakan pedagang adalah dilihat melalui ukuran keberhasilan evaluasi kebijakan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini bahwa Evaluasi Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Sukawati, Kabupaten Gianyar belum berjalan optimal. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan analisis pada 6 indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003). Berikut merupakan kesimpulan dari penelitian ini:

1. Berdasarkan analisis hasil temuan dalam indikator efektivitas, dapat disimpulkan bahwa indikator efektivitas belum tercapai sepenuhnya dan perlu adanya peningkatan. Sosialisasi dan pemantauan kebijakan telah berjalan baik, namun masih perlu peningkatan untuk mencapai tujuan kebijakan yang optimal. Perubahan infrastruktur yang bertingkat dinilai kurang efektif. Pada Pasar Seni Blok A dan B dampak infrastruktur kebijakan revitalisasi menyebabkan ketimpangan kunjungan antar lantai, di mana lantai atas lebih sepi dibanding lantai 1, yang berdampak pada pendapatan

pedagang. Di Blok C dan pasar umum relokasi merupakan hasil kebijakan adanya perubahan fungsi pasar, menyebabkan lebih dari setengah kios dan los yang tersedia tidak ditempati pedagang, hal ini menunjukkan pemanfaatan bangunan yang belum maksimal. Selain itu, relokasi pasar umum berdampak pada penurunan pendapatan pedagang pasar umum, serta berdampak pada aksesibilitas dan kebersihan lingkungan Desa Sukawati sebab sebagian besar pedagang pasar umum berjualan disebelah-sebelah kawasan pasar seni, menggunakan fasilitas umum untuk berjualan dan parkir seperti trotoar, dan jalan umum. Oleh karena itu, tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal dalam efektivitas kebijakan revitalisasi pasar.

2. Berdasarkan analisis hasil temuan dalam indikator efisiensi, dapat disimpulkan bahwa indikator efisiensi dalam kebijakan revitalisasi Pasar Sukawati belum memadai. Pada aspek anggaran dan sarana prasarana telah memadai, namun dalam aspek sumber daya manusia dan efisiensi waktu masih perlu ditingkatkan. Hasil temuan menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil bangunan revitalisasi belum optimal. Sebagai upaya optimalisasi maka diperlukan pelatihan, pengembangan, maupun pendampingan sumber daya manusia pasar yakni pengelola maupun pedagang, yang diharapkan dapat berperan secara aktif mendukung pemanfaatan hasil revitalisasi. Relokasi pasar yang menambah jarak tempuh, turut mempengaruhi efisiensi waktu. Selain itu, pada anggaran dan biaya operasional menunjukkan bahwa biaya operasional lebih besar dibandingkan pemasukan retribusi, hal tersebut tetap dapat dianggap efisien dari perspektif pelayanan publik jika manfaat yang diberikan lebih besar, seperti peningkatan kesejahteraan pedagang dan dampak positif pada ekonomi lokal. Namun, hasil temuan menunjukkan bahwa efektivitas revitalisasi pasar belum berdampak optimal sepenuhnya bagi sasaran kebijakan.
3. Berdasarkan analisis hasil temuan dalam indikator kecukupan, dapat disimpulkan bahwa indikator kecukupan belum tercapai, hasil temuan menunjukkan tingkat kunjungan ke pasar seni sukawati belum meningkat secara signifikan, kemudian kunjungan pasar umum relokasi masih minim dan partisipasi pedagang di Pasar Blok C serta pasar relokasi masih rendah, ditinjau dengan banyaknya kios dan los yang kosong.
4. Berdasarkan analisis hasil temuan dalam indikator pemerataan, dapat disimpulkan bahwa kriteria pemerataan dalam kebijakan revitalisasi Pasar Sukawati telah tercapai, namun masih perlu ditingkatkan. Fasilitas di Pasar Seni Blok A, B, dan C telah didistribusikan

secara merata, tetapi pemanfaatannya di Blok C belum optimal. Selain itu, kebijakan revitalisasi berdampak menimbulkan dinamika sosial di desa sukawati, akibat relokasi pasar umum yang belum berjalan optimal sehingga berdampak pada lingkungan dengan terganggunya fungsi ruang di kawasan pasar.

5. Berdasarkan analisis hasil temuan dalam indikator responsivitas, dapat disimpulkan bahwa indikator responsivitas sudah berjalan cukup memadai. Namun masih diperlukan peningkatan, hal ini dikarenakan masih terdapat keluhan-keluhan dari pedagang sebagai sasaran kebijakan. Pengelola perlu mengambil langkah konkret dan berkelanjutan dalam merespons keluhan pedagang agar mereka merasa didengar serta memperoleh solusi yang cepat dan efektif.
6. Berdasarkan analisis hasil temuan dalam indikator ketepatan, dapat disimpulkan bahwa indikator ketepatan belum sepenuhnya tercapai. Revitalisasi telah berhasil meningkatkan kualitas bangunan serta menyediakan sarana dan prasarana yang lebih baik bagi pasar seni sukawati. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan permasalahan baru dengan adanya infrastruktur bangunan bertingkat pada pasar seni dan perubahan fungsi pasar yang tidak hanya berdampak bagi kesejahteraan pedagang, serta optimalnya hasil kebijakan melalui bangunan yang disediakan tetapi juga berdampak pada kenyamanan lingkungan Desa Sukawati. Sinergi antara pemerintah, pengelola pasar, dan pedagang perlu diperkuat agar kebijakan revitalisasi ini tidak hanya menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga mampu berdampak optimal dengan meningkatkan kesejahteraan pedagang dan berdampak positif bagi masyarakat sekitar.

Adapun saran yang dapat diberikan untuk mengoptimalkan hasil kebijakan revitalisasi pasar sukawati, sebagai berikut:

- a. Untuk objek penelitian pada dasarnya dapat melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar kebijakan yang dijalankan dapat memberikan hasil, pemanfaatan, dan dampak yang optimal. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan. Selain itu melakukan kolaborasi dengan *stakeholder* seperti instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sehingga dapat meningkatkan partisipasi pedagang dan pengunjung dan pasar dapat beroperasi secara optimal.
- b. Bagi peneliti lain, yaitu bisa lebih fokus pada inovasi serta solusi dari hasil evaluasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat, terutama mengenai pemanfaatan

hasil kebijakan agar memberikan dampak terhadap pendorong perekonomian lokal. Penelitian tersebut dapat mengidentifikasi inovasi-inovasi yang dapat diterapkan sebagai solusi yang tepat guna.

- c. Bagi Keilmuan, yaitu perlu dilakukan penelitian mengenai ketepatan kebijakan melalui pendekatan berbasis pendidikan dan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran pedagang dan pengelola pasar tentang pentingnya keberadaan pasar rakyat, terutama dalam upaya mendukung kemandirian ekonomi lokal. Program pendidikan yang berbasis bukti akan lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Z. (2021). Evaluasi kebijakan revitalisasi pasar daerah tertinggal Kabupaten Buton Selatan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 222–233.
- Arafat. (2023). *Kebijakan publik: Teori dan praktik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Engkus, E. (2020). Implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Sarijadi Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 6(1), 9–16.
- Haryono, B. S., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2022, March). Realization of traditional market revitalization program: Efforts to strengthen stakeholder collaboration. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 74–82). Atlantis Press.
- Laili, N. N., Riswanda, R., & Yulianti, R. (2022). Evaluasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional dalam mewujudkan pengembangan ekonomi lokal di Pasar Petir Kabupaten Serang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 6(1), 27–39.
- Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2020 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pasar Tradisional oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pramono, J. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Surakarta: Unisri Press.

Rantung, M. I. R. (2024). Evaluasi kebijakan publik: Konsep dan model. Penerbit Tahta Media.

Subarsono. (2013). Analisis kebijakan publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.